

Tren Konsumsi Beras dan Implikasinya terhadap Ketahanan Pangan di Ponorogo Tahun 2021–2023

Mohammad Andre Prasetyo^{1*}, Anis Fadila²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Email : mohammadandreprasetyo@gmail.com, fadilaanis795@gmail.com

Article Info	Abstract
Article history: Received September 25, 2024 Revised November 29, 2024 Accepted December 18, 2024 Available online December 31, 2024 *Corresponding author email : mohammadandreprasetyo@gmail.com Keywords: Rice Consumption, Food Security, Ponorogo, Food Diversification	Introduction/Main Objectives: Rice consumption in Indonesia reflects the socio-economic dynamics of society and serves as an important indicator for assessing national food security, including at the local level. This article aims to analyze the Trends in Rice Consumption and Its Implications for Food Security in Ponorogo from 2021 to 2023. Research Methods: The study uses secondary data obtained from the Central Statistics Agency and other relevant sources, such as local government reports. The analysis is conducted using a descriptive quantitative approach, involving the evaluation of consumption trends, prices, and rice demand elasticity. Finding/Results: The results show that per capita rice consumption in Ponorogo has declined from 1.436 kg/week (2021) to 1.390 kg/week (2023). Key factors include food diversification, increased awareness of healthy eating habits, and changes in purchasing power. Rice demand is inelastic to price increases, indicating that rice remains an essential and irreplaceable staple. Conclusion: The conclusion of this study is that the decline in rice consumption reflects a shift in consumer food preferences towards more diverse options. The implication of these findings is the need for an effective food diversification strategy to maintain food security. Government policies should consider local socio-economic dynamics when designing food programs.

PENDAHULUAN

Beras adalah makanan pokok bagi mayoritas masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Ponorogo. Konsumsi beras tidak hanya mencerminkan kebiasaan makan tetapi juga kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata konsumsi beras per kapita di Ponorogo mengalami penurunan dari 1,436 kg/minggu pada 2021 menjadi 1,390 kg/minggu pada 2023. Penurunan ini diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti diversifikasi pangan, perubahan daya beli, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola makan sehat. Fenomena ini penting untuk dianalisis karena dapat memberikan gambaran tentang dinamika ketahanan pangan di tingkat regional, yang berimplikasi pada kebijakan pangan nasional.

Penelitian terkait diversifikasi pangan menunjukkan bahwa pergeseran pola konsumsi dari beras ke bahan pangan lain sering kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan budaya. Misalnya, (Susanto et al., 2020) menjelaskan bahwa diversifikasi pangan merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada beras. Di sisi lain, studi oleh (Putri, 2021) menyoroti pengaruh daya beli masyarakat terhadap preferensi konsumsi. Namun, penelitian ini belum secara spesifik membahas konteks lokal di Ponorogo, sehingga diperlukan studi yang lebih terfokus.

Kerangka berpikir penelitian ini bertumpu pada teori ekonomi makro, khususnya terkait permintaan dan konsumsi pangan. Penurunan konsumsi beras diasumsikan sebagai respons terhadap peningkatan akses masyarakat terhadap alternatif pangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penurunan konsumsi beras di Kabupaten Ponorogo selama periode 2021–2023, serta untuk memahami bagaimana perubahan pola konsumsi beras ini mencerminkan dinamika ketahanan pangan di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren konsumsi beras di Ponorogo, mengidentifikasi faktor-faktor seperti diversifikasi pangan, kesadaran pola makan sehat, dan perubahan daya beli masyarakat yang mempengaruhi penurunan konsumsi beras, serta mengevaluasi implikasi perubahan tersebut terhadap ketahanan pangan lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang membentuk pola konsumsi pangan di tingkat regional dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan pangan yang lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis tren konsumsi beras, elastisitas permintaan, dan pengaruh diversifikasi pangan terhadap konsumsi di Kabupaten Ponorogo selama periode 2021–2023. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang terukur dan objektif mengenai pola konsumsi

berdasarkan data statistik yang tersedia (Sugiono, 2010). Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis tren konsumsi, perhitungan elastisitas harga, serta evaluasi faktor-faktor yang memengaruhi konsumsi beras.

Definisi operasional dalam penelitian ini meliputi beberapa variabel. Konsumsi beras per kapita diukur dengan rata-rata konsumsi beras individu per minggu, dalam kilogram, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Harga beras dihitung berdasarkan rata-rata harga per kilogram yang diperoleh dari data Sistem Informasi Ketersediaan dan Harga Pokok (SISKAPERBAPO). Diversifikasi pangan diukur sebagai pengurangan konsumsi beras dibandingkan tahun sebelumnya, melalui survei konsumsi rumah tangga. Elastisitas permintaan beras dihitung dengan menggunakan persamaan elastisitas harga ($E_e = \% \Delta Q / \% \Delta P$), yang menunjukkan sensitivitas perubahan konsumsi terhadap perubahan harga.

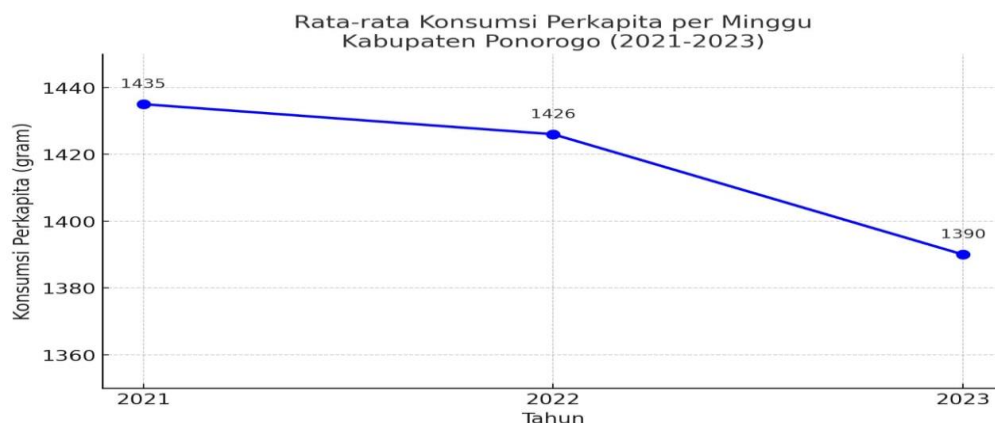
Unit analisis dalam penelitian ini adalah rumah tangga di Kabupaten Ponorogo sebagai konsumen beras, yang diukur secara agregat melalui data statistik. Data yang digunakan merupakan data sekunder, termasuk data konsumsi beras per kapita per minggu dari BPS Kabupaten Ponorogo, data harga beras dari SISKAPERBAPO, serta informasi mengenai produksi, distribusi, dan kebijakan pangan dari laporan resmi pemerintah daerah dan publikasi statistik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dari sumber resmi, yaitu BPS Kabupaten Ponorogo, SISKAPERBAPO, dan laporan pemerintah daerah terkait kebijakan pangan.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu analisis tren untuk menggambarkan perubahan konsumsi beras dari tahun ke tahun, perhitungan elastisitas harga, dan evaluasi faktor-faktor yang memengaruhi konsumsi melalui pengujian korelasi sederhana. Data yang digunakan mencakup periode tiga tahun (2021–2023), mencerminkan dinamika pasca-pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Untuk menjamin kecukupan dan validitas data, sumber data yang digunakan adalah resmi dan kredibel, serta data dianalisis melalui triangulasi dengan membandingkan laporan BPS, laporan pemerintah daerah, dan studi terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsumsi Beras di Kabupaten Ponorogo Pada tahun 2021-2023

Grafik 1.1. Rata-rata Konsumsi Perkapita per Minggu Kabutpaten Ponorogo



Sumber : Badan Pusat Statistik 2024

Pada tahun 2021, rata-rata konsumsi beras perkapita seminggu di Kabupaten Ponorogo dilaporkan mencapai 1,435 kg ([BPS Kabupaten Ponorogo, 2024](#)). Pada tahun 2021, konsumsi beras per kapita di Ponorogo tercatat cukup tinggi, mencapai 1,435 kg per minggu. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingginya konsumsi beras adalah pandemi COVID-19, yang menyebabkan pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dalam teori ekonomi makro, hal ini mencerminkan perubahan dalam siklus ekonomi, di mana krisis kesehatan menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Selama pandemi, masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, yang mempengaruhi konsumsi pangan, terutama beras, karena mereka lebih cenderung memasak di rumah dan memilih makanan yang dianggap lebih sehat, seperti makanan berbasis beras. Hal ini dapat dijelaskan dengan teori permintaan, di mana peningkatan waktu tinggal di rumah meningkatkan permintaan terhadap bahan pangan pokok, seperti beras, karena konsumsi beras sebagai bahan makanan utama lebih sering terjadi dalam situasi ini ([Susanto, Dedi, Uchyani, Rina, & Irawan, 2019](#))

Pada tahun 2022, meskipun konsumsi beras per kapita sedikit turun (0,63% dibandingkan tahun 2021), tingkat konsumsi masih relatif tinggi, dengan angka 1,426 kg ([BPS Kabupaten Ponorogo, 2024](#)). Namun, pada tahun 2023, seiring dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi, terdapat penurunan yang cukup signifikan dalam konsumsi beras di Ponorogo, yakni menjadi 1,390 kg per kapita per minggu ([BPS Kabupaten Ponorogo, 2024](#)). Penurunan ini dapat dilihat sebagai akibat dari pemulihan ekonomi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai jenis pangan lain yang lebih beragam, seiring dengan meningkatnya pendapatan dan pilihan konsumsi.

Dalam teori siklus ekonomi, pemulihan ekonomi ini mencerminkan fase ekspansi setelah resesi akibat pandemi, di mana masyarakat mulai mengalihkan konsumsi mereka ke barang-barang yang lebih beragam, termasuk makanan cepat saji dan makanan praktis ([Katadata, 2024](#)). Hal ini berhubungan dengan perubahan preferensi konsumen yang lebih memilih kemudahan dan kecepatan, yang sesuai dengan pergeseran tren konsumsi, terutama di kalangan generasi muda. Perubahan dalam pola konsumsi ini juga berhubungan dengan konsep pendapatan per kapita dan daya beli. Ketika perekonomian mulai pulih, pendapatan masyarakat meningkat, yang mengarah pada diversifikasi konsumsi pangan, tidak lagi terfokus pada beras.

Rata-rata konsumsi perkapita seminggu merupakan ukuran statistik yang menunjukkan jumlah rata-rata bahan pangan yang dikonsumsi oleh setiap individu dalam satu minggu. Data ini biasanya dikelompokkan berdasarkan jenis bahan pangan, termasuk kelompok padi-padian seperti beras, jagung, dan lainnya. Ukuran ini digunakan untuk menganalisis pola konsumsi masyarakat di suatu wilayah tertentu, misalnya per kabupaten atau kota. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pengukuran konsumsi perkapita ini diambil melalui survei rumah tangga yang mendokumentasikan jumlah konsumsi berbagai jenis bahan pangan. Hasilnya bermanfaat untuk mengetahui tingkat kecukupan pangan, tren

konsumsi, serta untuk merancang kebijakan pangan yang lebih baik di tingkat regional maupun nasional (Susanto et al., 2022).

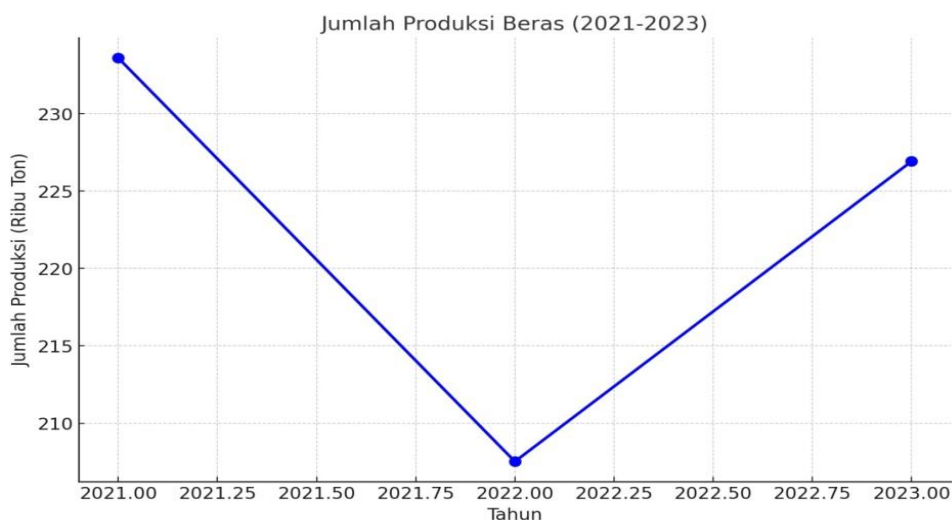
Data rata-rata konsumsi beras per kapita di Kabupaten Ponorogo pada 2021–2023 menunjukkan tren penurunan. Penurunan ini terjadi seiring berakhirnya pandemi COVID-19 yang membuat aktivitas masyarakat kembali normal. Pemulihan ekonomi memungkinkan masyarakat mengakses berbagai jenis bahan pangan lain, sehingga konsumsi beras tidak lagi dominan.

Ketersediaan dan Distribusi Beras di Ponorogo tahun 2021-2023

1. Ketersediaan Beras di Ponorogo tahun 2021-2023

Pada tahun 2021, Kabupaten Ponorogo mencatat produksi beras sebesar 233,66 ribu ton, meningkat 7,24% dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi ini berasal dari luas panen padi sebesar 68,74 ribu hektar, yang juga mengalami peningkatan sebesar 5,64% dibandingkan tahun 2020. Faktor utama peningkatan ini adalah metode survei berbasis Kerangka Sampel Area (KSA) yang meningkatkan akurasi data (BPS Kabupaten Ponorogo, 2023). Sedangkan pada tahun 2022 Produksi beras di Kabupaten Ponorogo mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total produksi sebesar 207,53 ribu ton, turun 11,18% dari 233,66 ribu ton pada 2021. Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya luas panen sebesar 8,40%, dari 68,74 ribu hektar menjadi 62,96 ribu hektar (BPS Kabupaten Ponorogo, 2022). Pada tahun 2023 Produksi beras di Kabupaten Ponorogo kembali mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai 226,92 ribu ton atau naik 9,34% dari 207,53 ribu ton pada 2022. Peningkatan ini sejalan dengan luas panen padi yang bertambah 5,77%, dari 62,96 ribu hektar menjadi 66,59 ribu hektar. (BPS Kabupaten Ponorogo, 2023).

Grafik 1.2 Jumlah Produksi Beras



Sumber : Data BPS Kabupaten Ponorogo Tahun 2022, 2023

Tabel 1. Tabel Produksi Beras

Tahun	Jumlah Produksi Beras (Ribuan Ton)	Jumlah Konsumsi Beras Perkapita (Seminggu/Kg)	Luas Panen (Ribuan Hektar)
2021	233,66	1,435	68,74
2022	207,53	1,426	62,96
2023	226,92	1,390	66,59

Sumber: Data BPS Kabupaten Ponorogo Tahun 2022, 2023

Pada tahun 2021, peningkatan produksi sebesar 7,24% dibandingkan tahun sebelumnya mencerminkan optimalisasi lahan dengan penerapan metode survei berbasis Kerangka Sampel Area (KSA). Dalam teori ekonomi makro, peningkatan produktivitas sering kali terkait dengan pengelolaan sumber daya yang lebih baik dan dukungan teknologi. Namun, pada tahun 2022, produksi beras mengalami penurunan 11,18% akibat penyusutan luas panen sebesar 8,40%. Penurunan ini menunjukkan pengaruh eksternalitas negatif, seperti cuaca buruk atau keterbatasan akses terhadap input pertanian, yang dapat menghambat efisiensi produksi (Putri, 2021). Pada tahun 2023, produksi beras kembali meningkat 9,34% seiring dengan bertambahnya luas panen sebesar 5,77%. Kenaikan ini mencerminkan pemulihan sektor pertanian setelah pandemi melalui dukungan kebijakan pemerintah, seperti subsidi pupuk dan pengembangan infrastruktur irigasi. Dalam teori diversifikasi ekonomi, peningkatan produksi beras juga menunjukkan peran penting sektor pertanian dalam menjaga stabilitas pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Susanto et al., 2020).

Selain memproduksi beras sendiri Ponorogo juga mengimpor beras dari luar negeri untuk menjaga ketersediaan beras. Impor beras menjadi salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia, termasuk di Ponorogo, untuk menjaga stabilitas pasokan beras. Pada tahun 2023, misalnya, pemerintah Indonesia mengimpor sekitar 1,5 juta ton beras dari negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Implikasi dari impor ini adalah untuk mengatasi kekurangan pasokan beras domestik, terutama karena faktor cuaca seperti El Nino yang mengurangi hasil panen dalam negeri. Pada tingkat lokal, Bulog Ponorogo mendatangkan beras impor sejak awal 2024 setelah stok beras dalam negeri habis pada awal Januari. Beras ini disalurkan melalui berbagai program stabilisasi harga pangan, seperti Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM), untuk memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat (ANTARA News Jawa Timur, 2024).

2. Distribusi Beras di Ponorogo tahun 2021-2023

Distribusi beras di Ponorogo dilakukan oleh dua pihak, yaitu pemerintah (Bulog) dan sektor swasta. Pemerintah dalam hal ini diwakili Bulog memainkan peran utama dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. Bulog Ponorogo memiliki gudang dengan kapasitas besar, menyimpan hingga 19 ribu ton beras pada 2024. Distribusi dilakukan untuk tiga wilayah utama: Ponorogo, Magetan, dan Pacitan. Sebagian besar

distribusi Bulog dialokasikan untuk program bantuan pangan dan stabilisasi harga. Program-program ini memerlukan 2.000 ton beras per bulan selama periode tertentu, meskipun pada situasi normal distribusinya berkisar 500-1.000 ton per bulan ([JatimNow, 2024](#)).

Selain dari pemerintah sektor swasta juga memainkan peran yang signifikan, terutama dalam pengadaan beras kualitas tinggi untuk pasar umum. Misalnya adalah PT. Jatim Grha Utama melaksanakan program distribusi beras murah melalui Operasi Pasar Lumbung Pangan. Program ini bertujuan untuk menekan inflasi regional dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa strategi distribusi yang terorganisir memungkinkan penyebaran beras murah ke berbagai titik distribusi, sehingga efektif dalam mencapai masyarakat yang membutuhkan ([Putra & Anisykurilillah, 2023](#)).

Menurut teori distribusi, mekanisme distribusi bertujuan untuk memastikan ketersediaan barang dengan harga yang stabil. Bulog bertugas menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. Program seperti Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) adalah contoh nyata implementasi teori distribusi, di mana intervensi pemerintah memastikan pemerataan akses pangan ([Haryanto, 2018](#)). Namun, tantangan efisiensi sering muncul karena regulasi yang membatasi fleksibilitas distribusi. Sektor swasta mendukung distribusi beras dengan kualitas lebih tinggi untuk pasar umum. Program seperti Operasi Pasar Lumbung Pangan membantu mengendalikan inflasi pangan regional. Kerja sama antara pemerintah dan swasta diperlukan untuk menghindari kompetisi yang tidak sehat dan memastikan distribusi yang merata ([Prasetyo, 2019](#)).

Meskipun ada peningkatan dalam produksi dan distribusi beras, tantangan tetap ada. Beberapa masalah yang dihadapi termasuk inefisiensi dalam sistem distribusi dan harga beras yang tidak stabil. Ponorogo memiliki daerah yang sulit dijangkau karena kondisi geografisnya. Distribusi ke wilayah-wilayah ini membutuhkan infrastruktur yang memadai, seperti jalan dan transportasi yang baik. Selain itu, serangan hama juga menjadi kendala dalam proses distribusi beras. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa langkah revitalisasi tata niaga beras telah disarankan, termasuk peningkatan program pemberdayaan petani dan pengembangan sistem informasi harga produk pertanian secara online untuk memberikan informasi terkini kepada petani dan pedagang ([Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, 2013](#)).

Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan dalam distribusi beras di Ponorogo selama periode 2021-2023, upaya dari pemerintah dan sektor swasta menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan aksesibilitas pangan bagi masyarakat. Dengan terus memperbaiki sistem distribusi dan memberdayakan petani, diharapkan ketahanan pangan di daerah ini dapat terjaga dengan baik.

Kebijakan Pemerintah dalam Mencukupi Ketersediaan Beras di Ponorogo Tahun 2021-2023

Pemerintah telah melaksanakan kebijakan subsidi yang mendukung petani lokal, seperti subsidi pupuk dan bantuan langsung untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Sebagai contoh, pada tahun 2022, program subsidi pupuk dari pemerintah daerah telah meningkatkan produktivitas petani di Ponorogo hingga 10% ([BPS Kabupaten Ponorogo, 2024](#)). Program ini tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga membantu menurunkan biaya produksi, yang pada gilirannya mempengaruhi ketersediaan beras.

Pemerintah memberikan subsidi pada sektor pertanian, terutama subsidi pupuk, yang bertujuan meningkatkan produktivitas petani dan menurunkan biaya produksi. Dalam teori ekonomi makro, kebijakan subsidi termasuk dalam kebijakan fiskal yang mempengaruhi sisi penawaran dalam perekonomian. Dengan adanya subsidi pupuk, biaya produksi yang lebih rendah dapat mendorong peningkatan produksi beras lokal. Ini sesuai dengan hukum penawaran, di mana penurunan biaya produksi dapat meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan pada harga yang lebih rendah, yang dalam hal ini adalah beras. Efek jangka panjang dari kebijakan subsidi ini adalah peningkatan kapasitas produksi domestik, yang membantu menjaga kestabilan harga beras ([Edi, 2020](#)).

Pemerintah juga berupaya menjaga kestabilan harga beras melalui berbagai langkah, seperti operasi pasar dan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET). Melalui operasi pasar, pemerintah berhasil menurunkan harga beras di beberapa daerah pada 2022, meski dampaknya lebih terasa di wilayah perkotaan. Selain itu, Badan Pangan Nasional (BPN) juga mengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang digunakan untuk menstabilkan harga beras di pasar, bahkan mempercepat distribusinya pada 2023 guna mencegah lonjakan harga ([Nasional, 2023](#)).

Kebijakan stabilisasi harga melalui operasi pasar dan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bertujuan untuk menjaga kestabilan harga beras. Dalam teori ekonomi makro, stabilisasi harga adalah salah satu tujuan kebijakan moneter dan fiskal untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) juga bertujuan untuk membatasi inflasi yang disebabkan oleh lonjakan harga barang pokok, seperti beras. Melalui operasi pasar, pemerintah dapat mengintervensi pasar untuk mencegah harga beras naik secara drastis, yang berpotensi memperburuk inflasi. Hal ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi ([Zain & Rachman, 2019](#)).

Kebijakan subsidi dan stabilisasi harga beras terbukti cukup efektif dalam mencukupi kebutuhan beras masyarakat. Operasi pasar di Ponorogo pada 2022 berhasil menurunkan harga beras sebesar 5%, meskipun dampaknya lebih terasa di wilayah perkotaan daripada di pedesaan. Selain itu, produksi beras di Ponorogo juga mengalami peningkatan pada 2023, dengan produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk mencapai 226,92 ribu ton, meningkat 9,34% dibandingkan tahun sebelumnya ([BPS Kabupaten Ponorogo, 2024](#)).

Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah ketidakmerataan distribusi beras antara daerah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, birokrasi yang rumit dalam penyaluran subsidi serta anggaran yang terbatas seringkali

menghambat percepatan kebijakan. Sebagai contoh, meskipun cadangan beras pemerintah cukup, distribusi ke daerah-daerah terpencil sering kali terhambat (Nasional, 2023). Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, diperlukan beberapa perbaikan. Salah satunya adalah perluasan program subsidi pupuk dan stabilisasi harga hingga ke daerah-daerah terpencil. Hal ini dapat meningkatkan produksi beras lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Perubahan Pola Konsumsi Makanan Terhadap Konsumsi Beras di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2023

Perubahan pola konsumsi makanan terhadap konsumsi beras adalah pergeseran preferensi atau kebiasaan masyarakat dalam memilih dan mengonsumsi jenis makanan, khususnya makanan pokok, yang dapat memengaruhi tingkat konsumsi beras. Perubahan ini biasanya melibatkan penurunan atau peningkatan konsumsi beras sebagai makanan pokok utama akibat pengaruh berbagai faktor.

Tabel 2. Data Jumlah Konsumsi Beras

Tahun	Konsumsi Beras (Per Minggu)	Konsumsi Beras (Per Tahun)
2021	1.436	74,672
2022	1.426	74,152
2023	1.390	72,280

Sumber: Data BPS 2024

Dari tabel tersebut, terlihat tren penurunan konsumsi beras dari tahun 2021 hingga 2023, dengan penurunan sebesar: 2021–2022: 520 kg (0,7%) dan pada 2022–2023: 1,872 kg (2,5%). Lantas untuk menganalisis perubahan pola konsumsi makanan terhadap konsumsi beras, kita perlu mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi konsumsi beras serta perubahan preferensi masyarakat dalam memilih sumber karbohidrat atau makanan pokok lainnya.

1. Diversifikasi Pangan

Diversifikasi pangan merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat untuk meningkat ketersediaan berbagai jenis bahan pangan agar kebutuhan pangan masyarakat tidak hanya tergantung pada satu jenis bahan pangan saja. Pengembangan diversifikasi pangan pada awalnya hanya difokuskan penyediaan bahan pangan pokok beras, sehingga diversifikasi pangan lebih difokuskan pada pengurangan jumlah konsumsi beras yang dapat disubsitusi oleh bahan lainnya. Dari sisi konsumsi, diversifikasi pangan mencakup aspek perilaku manusia dalam mengonsumsi bahan pangan yang beragam, namun tidak terlepas dari aspek pendapatan dan harga komoditas, maupun non ekonomis seperti kebiasaan, selera dan pengetahuan (Sudrajat, 2023).

2. Perubahan Gaya Hidup

Gaya hidup merupakan cara yang dijalankan oleh setiap masing-masing individu bagaimana mereka menghabiskan waktu, membelanjakan uang dan mengekspresikan diri terhadap lingkungan tempat tinggal sesuai dengan minat dan opini atau pendapat. Gaya

hidup bisa kapan saja berubah sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Hal ini dikarenakan aktivitas serta opini yang dapat berubah tergantung lingkungannya (Evangelistha et al., 2022). Yang dimaksudkan adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan beragam dapat memengaruhi konsumsi beras. Masyarakat mulai mengurangi konsumsi nasi putih karena dianggap tinggi glikemik, sehingga lebih memilih alternatif yang lebih sehat seperti: Beras merah atau beras organik ataupun Karbohidrat kompleks (*quinoa, oat*).

3. Faktor Ekonomi

Perubahan harga beras di pasar lokal dapat memengaruhi daya beli masyarakat. Sertatingkat pendapatan masyarakat. Jika pendapatan meningkat, konsumen cenderung mengganti beras dengan makanan yang lebih bervariasi.

4. Urbanisasi dan Modernisasi

Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi dapat menjadi masalah yang cukup serius bagi kita apabila pemerintah tidak dapat mengatur dan memfasilitasi para kaum urban yang datang di kota dengan jumlah yang semakin meningkat setiap tahunnya. Persebaran penduduk yang tidak merata antara desa dengan kota akan menimbulkan berbagai permasalahan di kehidupan sosial kemasyarakatan. Urbanisasi di Ponorogo dapat mengubah pola konsumsi masyarakat dari makanan tradisional berbasis beras ke makanan siap saji atau olahan yang lebih praktis.

5. Pengaruh Pandemi COVID-19

Covid-19 merupakan penyakit akibat virus corona jenis baru yang muncul pada akhir 2019 pertama kali di Wuhan, Cina yang saat ini menyebabkan pandemi hampir di seluruh dunia. Gejala utama penyakit Covid-19 yaitu batuk, demam, dan sesak napas (Sari, 2022:80). Pada awal pandemi (2020–2021), pola konsumsi masyarakat mungkin cenderung kembali ke makanan pokok seperti beras untuk efisiensi biaya dan ketersediaan. Namun, setelah pandemi mereda, preferensi masyarakat bisa bergeser kembali.

Perubahan pola konsumsi makanan terhadap konsumsi beras menggambarkan bagaimana preferensi masyarakat terhadap makanan memengaruhi tingkat konsumsi beras sebagai makanan pokok. Pergeseran ini penting untuk dipahami karena berkaitan dengan keberlanjutan ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan kebijakan distribusi pangan di suatu wilayah.

Pengaruh Harga Beras Terhadap Konsumsi Beras di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 –2023

Harga yakni unsur krusial dari sebuah produk, sebab harga bisa memberi pengaruh pada keuntungan produsen. Selain itu, harga bisa juga menjadi sarana untuk konsumen mempertimbangkan sesuatu yang akan dibelinya, oleh karenanya butuh pertimbangan tersendiri dalam menentukan harga tersebut. Philip Kotler memberi penjelasan terkait harga sebagai sejumlah uang atau nilai dimana dibebankan atas jasa atau produk untuk sejumlah

nilai yang konsumen tukarkan atas berbagai manfaat harga yang mana merupakan faktor krusial yang memengaruhi pembeli dalam memilih, hal tersebut berlaku di negara miskin, akan tetapi faktor non harga sendiri menjadi sesuatu yang lebih krusial bagi pembeli dalam memilih pada sepuluh tahun terakhir ini. *Price* (harga) dalam artian paling sempit yakni total uang yang dibebankan atas jasa maupun produk (Sitorus, 2022). Harga beras terhadap konsumsi beras mengacu pada hubungan antara harga beras (biaya per kilogram atau satuan tertentu) dan tingkat konsumsi beras (jumlah beras yang dikonsumsi oleh masyarakat).

Tabel 2. Data Harga Beras dan Konsumsi Beras

Tahun	Harga Beras (Rp)	Konsumsi Beras (Perminggu)
2021	8.858	1.436
2022	9.770	1.426
2023	11.000	1.390

Sumber: SISKAPERBAPO, BPS Kabupaten Ponorogo

Elastisitas (*elasticity*) adalah ukuran kepekaan jumlah permintaan atau jumlah penawaran terhadap suatu determinan, yakni faktor penentu atau faktor pengubah atau faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan adalah tingkat perubahan permintaan terhadap barang/jasa, yang diakibatkan adanya perubahan harga barang/jasa tersebut (Ali, 2022).

Interpretasi Nilai Elastisitas:

1. Jika $E > 1$: Permintaan elastis, artinya jumlah barang yang diminta sangat sensitif terhadap perubahan harga.
2. Jika $E < 1$: Permintaan inelastis, artinya jumlah barang yang diminta tidak sensitif terhadap perubahan harga.
3. Jika $E = 1$: Permintaan *unitary elastic*, artinya perubahan harga menyebabkan perubahan proporsional dalam jumlah barang yang diminta

Tabel 3. Perhitungan Elastisitas Harga Beras

Periode	Harga Awal (Rp/kg)	Harga Akhir (Rp/kg)	Konsumsi Awal (kg/minggu)	Konsumsi Akhir (kg/minggu)	% Δ Harga	% Δ Konsumsi	Elastisitas (E_e)
2021 ke 2022	8.858	9.770	1.435	1.426	10.29%	-0.63%	-0.061
2022 ke 2023	9.770	11.000	1.426	1.390	12.57%	-2.52%	-0.200

Pada periode 2021 ke 2022 Harga beras meningkat 10.29%, tetapi konsumsi hanya turun 0.63%. Elastisitas permintaan beras sebesar -0.061 menunjukkan konsumsi sangat tidak sensitif terhadap kenaikan harga. Sedangkan pada periode 2022 ke 2023 Harga beras meningkat lebih tinggi, sebesar 12.57%, dan konsumsi turun 2.52%. Elastisitas sebesar -0.200 menunjukkan konsumsi masih tidak elastis, tetapi sedikit lebih responsif dibandingkan periode sebelumnya. Kedua nilai tersebut memiliki nilai absolut $E < 1$, yang mengindikasikan bahwa permintaan beras bersifat inelastis.

Konsumsi beras tidak berubah signifikan meskipun harga mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh sifat beras sebagai barang kebutuhan pokok yang sulit digantikan dalam pola makan masyarakat. Inelastisitas ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung tetap mengonsumsi beras meskipun harganya naik, karena substitusi dengan barang lain (seperti jagung atau gandum) biasanya memerlukan perubahan signifikan dalam preferensi atau kebiasaan.

KESIMPULAN

Perubahan pola konsumsi makanan terhadap konsumsi beras menggambarkan bagaimana preferensi masyarakat terhadap makanan memengaruhi tingkat konsumsi beras sebagai makanan pokok. Data menunjukkan bahwa konsumsi beras per tahun menurun dari 74.672 kg (2021) menjadi 72.280 kg (2023). Ini disebabkan oleh pergeseran ke pola makan yang lebih bervariasi atau faktor lain seperti daya beli masyarakat dan diversifikasi pangan. Konsumsi beras tidak berubah signifikan meskipun harga mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh sifat beras sebagai barang kebutuhan pokok yang sulit digantikan dalam pola makan masyarakat. Inelastisitas ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung tetap mengonsumsi beras meskipun harganya naik, karena substitusi dengan barang lain (seperti jagung atau gandum) biasanya memerlukan perubahan signifikan dalam preferensi atau kebiasaan.

REFERENSI

- ANTARA News Jawa Timur. (2024). *Bulog Ponorogo gunakan beras impor untuk stabilisasi pasar*. 2024, Desember 3. <https://jatim.antaranews.com/berita/772266/bulog-ponorogo-gunakan-beras-impor-untuk-stabilisasi-pasar>
- BPS. (2022). *Luas Panen dan Produksi Padi di Kabupaten Ponorogo 2022 (Angka Tetap)*. Bps, 04(02), 1–20.
- BPS Kabupaten Ponorogo. (2024). *Rata-rata Konsumsi Perkapita Seminggu Menurut Kelompok Padi-Padian Per Kabupaten/kota (Satuan Komoditas), 2021-2023*. 10 Januari 2024.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. (2013). *Merevitalisasi tata niaga beras di Jawa Timur*. 2013, Desember 3. <https://disperindag.jatimprov.go.id/post/detail?content=merevitalisasi-tata-niaga-beras-di-jawa-timur>

- Edi, D. (2020). Dampak kebijakan subsidi terhadap produksi sektor pertanian. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 45-56, 15(2), 45–56.
- Evangelistha, N., Lindratno, N., & Anasrulloh, M. (2022). *Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Tulungagung (Studi Kasus Pada Rumah Putih Coffee House)*. 1.
- Haryanto, D. (2018). Kebijakan stabilisasi harga pangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 26(1), 45-52.
- JatimNow. (2024). *Stok Beras SPHP sempat kosong, ini penjelasan Bulog Ponorogo*. 2024, Desember 3. <https://jatimnow.com/baca-66159-stok-beras-sphp-sempat-kosong-ini-penjelasan-bulog-ponorogo>
- Katadata. (2024). *Konsumsi beras per kapita Indonesia turun pada 2023*. 2024, Desember 2. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/ed1c66426b1f5df/konsumsi-beras-per-kapita-indonesia-turun-pada-2023>
- Lingkungan, D. G., Geografi, F., & Mada, U. G. (2023). *Diversifikasi dan Diferensiasi Konsumsi Pangan Lokal di Desa Bleberan Pemetaan mobilitas penduduk Pola di kawasan pinggiran Kota Bandung Playen*. <https://doi.org/10.22146/mgi.70636>
- Maulana Yogi Aditya Dwi Putra, & Rosyidatuzzahro Anisykurilillah. (2023). Distribusi Beras Murah Untuk Masyarakat Oleh PT. Jatim Grha Utama Dalam Gelaran Operasi Pasar Lumbung Pangan. *NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 59–69.
- Nasional, B. P. (2023). *NFA paparkan strategi pengendalian harga beras akhir tahun 2023*. 2023, Desember 1. <https://badanpangan.go.id/blog/post/nfa-paparkan-strategi-pengendalian-harga-beras-akhir-tahun-2023>
- Prasetyo, B. (2019). Peran sektor swasta dalam distribusi pangan. *Jurnal Pangan Dan Agroindustri*, 5(4), 89--96.
- Profit, K., Dari, D., Ekonomi, P., & Sitorus, A. P. (2022). *Mekanisme Penetapan Harga (Price) Dan Kebijakan Penentuan*. 1(1).
- Putri, N. A. (2021). Pengaruh Eksternalitas Negatif terhadap Produksi Beras. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 10(2), 78-89
- Statistic Indonesia. (2023). Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia 2023 (Angka Tetap). *Berita Resmi Statistik*, 2023(68), 1–8.
- Susanto, Dedi, Uchyani, Rina, & Irawan, E. (2019). *Analisis ketahanan pangan rumah tangga petani padi berdasarkan proporsi pengeluaran pangan dan konsumsi energi di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten*. *Agrista*. 2(2015), 57–60.
- Susanto, D., Uchyani, R., & Irawan, E. (2022). Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Padi Berdasarkan Proporsi Pengeluaran Pangan Dan Konsumsi Energi Di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten. *Agrista*, 10(3), 65–74.